

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN

Mokhamad Arif Setyawantika¹, Tatag Wiranto²
^{1,2}Program Magister Administrasi Publik, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
ariftika@gmail.com

Abstract

Hence, the implementation of good government procurement system is one that enable the actualization of the principles of good government governance. The research purposes are describing the process of policy implementation of the procurement services unit, knowing factors that becomes the problems as well as the solutions being made to overcome that problems. The result of this research shows that application of the principles of good government governance in the procurement of goods and/or services has not been done optimally, as an independent procurement services unit in government organizations has not been established yet. The policy implementation of the Procurement Services Unit on the General Directorate of the Nation Wealth, Indonesian Ministry of Finance is based on the Presidential Regulation article 4 of 2015 as the fourth amendment of Presidential Regulation Article 54 of 2010 about Government Procurement of Goods and/or Services. This research uses a descriptive analysis, by the use of data: (1) the historical documentation and narratives, (2) the literature and document study, and (3) the data that are derived from respondents. Based on the data analysis, this research concludes that the basic precondition for the success of the policy implementation process in the establishment of the procurement services unit at the Directorate General of State Asset Management, Ministry of finance, strongly influenced by the structure of the Organization, as mandated by the regulations. This research suggests that the policy implementation process in the formation of an independent procurement services unit needs to be revised to be accorded to the regulations.

Keywords: *policy, procurement services unit of the goods/services of government, good governance*

Abstrak

Pada hakekatnya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan unit layanan pengadaan, dengan mengetahui faktor apa saja yang dihadapi (menjadi permasalahan) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah (solusi) yang ada tersebut. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa belum terlaksana secara optimal, karena belum terbentuknya unit layanan pengadaan yang independen pada organisasi pemerintah. Implementasi kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan data: (1) historis berupa dokumentasi dan narasi, (2) data studi kepustakaan dan studi dokumenter, dan (3) data lapangan berasal dari responden. Berdasarkan hasil analisis data, penulis menyimpulkan bahwa prasyarat dasar keberhasilan proses implementasi kebijakan dalam pembentukan unit layanan pengadaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sangat dipengaruhi terutama oleh faktor struktur organisasi, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan/revisi terhadap proses kebijakan dalam pembentukan unit layanan pengadaan yang independen.

Kata kunci : *kebijakan, unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, good governance*

Pendahuluan

Governance disini diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance* pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu sebagai aktor yang menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk aktif melakukan upaya tersebut.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata kelola pemerintahan yang baik, sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah *governance* adalah Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan Tahun 1992 berjudul *Governance and Development*. Definisi *governance* menurut Bank Dunia adalah "*the manner in which power is exercised in the management of a country's social and economic resources for development*". Berikutnya adalah Asian Development Bank (ADB) yang sejak tahun 1995 telah memiliki policy paper bertajuk *Governance: Sound Development Management*. Kebijakan ADB yang mengartikulasi empat elemen esensial dari Good Governance yaitu *accountability, participation, predictability, dan transparency*. UNDP kemudian membuat definisi yang lebih ekspansif, *governance* meliputi pemerintah, sektor swasta, dan *civil society* serta interaksi antar ketiga elemen tersebut (lihat UNDP, *Reconceptualising Governance: Discussion Paper No. 2:1997*). Dalam dokumen kebijakannya UNDP lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good*

governance, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, social dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjwai setiap langkah *governance*.

Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok/organisasi tertentu.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu proses tata kelola pemerintahan yang sangat penting. Proses pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan keempat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Praktek pengadaan barang/jasa pemerintahan belum pada tataran melaksanakan prinsip-prinsip *Good Procurement Governance* yang berbasis pada asas partisipasi, transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan keadilan.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang

bangun dan rekayasa nasional, untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang/jasa nasional pada perdagangan internasional.

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakteraturan sistem pengadaan barang/jasa juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

Langkah-langkah penunjang kesuksesan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penambahan jumlah praktisi pengadaan dan pelaksanaan pelatihan tingkat dasar dan ujian untuk mendapatkan sertifikat bagi praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan inisiatif yang penting. Keahlian pengadaan hanya terbatas pada sekelompok kecil individu dalam jajaran lembaga tertentu. Tidak ada kader praktisi pengadaan, dan tidak ada jalur karir atau sistem insentif yang jelas baik untuk manajemen proyek maupun manajemen pengadaan, pimpinan proyek dan kelompok kerja unit layanan pengadaan kembali menduduki posisi mereka sebelumnya setelah proyek selesai dilaksanakan. Hal ini telah menimbulkan fragmentasi dalam menghimpun pengalaman pengadaan di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai faktor penunjang berikutnya perlunya standar operasional prosedur sebagai acuan dan tata cara kerja yang baik, standar dan transparan sehingga kebutuhan untuk memperkuat pengawasan internal terutama kapasitas penegakan aturan dalam lembaga pemerintahan, termasuk pelaksanaan sanksi yang ketat dan tegas jika terjadi penyalahgunaan dan kinerja yang tidak baik. Sementara Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan keempat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memungkinkan untuk mengikuti prosedur tersebut. Dalam

perkembangannya instansi pemerintah mulai berbenah dengan membentuk unit kepatuhan internal sebagai unit yang mengedepankan upaya-upaya preventif untuk menghindari terjadinya malpraktik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu pemerintah juga telah membentuk lembaga-lembaga komisioner yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini sangat berperan penting terkait dengan penanganan keluhan terhadap isu korupsi yang menjadi tugas KPK dan persaingan yang tidak adil yang menjadi wewenang KPPU.

Disamping hal tersebut di atas, komitmen pimpinan unit organisasi yang membidangi dan berkaitan langsung untuk terlaksananya tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik haruslah turut berperan serta aktif. Sehingga semua proses dari tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dikawal sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Begitu juga halnya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan keempat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Mencermati kondisi pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara saat ini juga belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan belum tersedianya unit layanan pengadaan yang independen sehingga harapan untuk terselenggaranya proses pengadaan yang baik, transparan dan akuntabel masih belum dapat diwujudkan dengan lebih baik. Perlu segera adanya perbaikan peraturan terkait pembentukan unit layanan pengadaan.

Kondisi unit layanan pengadaan yang ada saat ini masih dimungkinkan terjadinya intervensi dari berbagai pihak serta masih rawan terjadinya *conflict of interest*. Kelemahan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah baik dari segi substansi hukum

maupun budaya birokrasi organisasi dan aparatur yang belum menunjang terlaksananya pengadaan barang/jasadengan baik, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yang akhir-akhir ini sering muncul dalam temuan aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Unit Layanan Pengadaan Independen sebagai salah satu aktor penting yang berperan serta aktif dalam penyelenggaraan tata kelola pengadaan barang/jasa tersebut sudah selayaknya segera untuk diwujudkan pembentukannya, sehingga cita-cita untuk terciptanya *good procurement governance* pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dapat segera terwujud dan terjamin pelaksanaannya. Apalagi pada saat ini Kementerian Keuangan dengan peraturannya nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik dan nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sangat mendukung program pemerintah terkait percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metode Penelitian

Permasalahan yang diteliti terkait permasalahan yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang diajukan kepada responden dalam bentuk pertanyaan.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari responden berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel bebas dan variabel terikat pada unit organisasi yang terkait dengan pelaksanaan layanan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Studi dalam rangka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, karena penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada serta memberikan gambaran permasalahan yang terjadi menggunakan analisis dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini dilaksanakan pada populasi dan pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian serta analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui isi implementasi kebijakan terkait pembentukan Unit Layanan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Penelitian akan dilaksanakan terhadap 45 orang responden yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat : 3 responden.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara : 13 responden.
- c. Unit Layanan Pengadaan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa: 16 responden.
- d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara : 13 responden.

Permasalahan yang diteliti terkait permasalahan yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang diajukan kepada responden dalam bentuk pertanyaan.

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang signifikan antara Sumber Daya Manusiaterhadap Kinerja Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
2. Ada pengaruh yang signifikan antara Standar Operasional Prosedur terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara Struktur Organisasi terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan perumusan kebijakan untuk pembentukan unit layanan independen. Tujuan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan fakta dari variabel-variabel bebas yang berpengaruh langsung terhadap variabel terikat. Tempat pelaksanaan penelitian atau lokus penelitian dipilih di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan karena merupakan tempat kerja peneliti. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan sejak Bulan April 2015 sampai dengan selesainya waktu pelaksanaan penelitian.

Dalam penelitian ini, Variabel Independen yang ditentukan adalah Sumber Daya Manusia (X1), Standar Operasional Prosedur (X2), dan Struktur Organisasi (X3). Sedangkan Variabel Dependennya adalah Kinerja Implementasi Kebijakan (Y).

Variabel penelitian yang telah dipilih dan didefinisikan tercantum dalam kerangka pemikiran di atas, selanjutnya akan dioperasionalisasikan dan diukur. Dalam hal operasionalisasi variabel-variabel tersebut menjadi indikator-indikatornya. Pengukuran yang digunakan dalam bentuk skala interval akan diterapkan pada semua item pertanyaan yang terdiri dari beberapa pertanyaan alternatif, dimana nilai 1 untuk tingkat paling rendah dan nilai 5 untuk tingkat yang paling tinggi. Nilai 2 untuk nilai yang rendah, nilai 3 untuk tingkat cukup dan nilai 4 untuk tingkat yang tinggi.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan dimaksud.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam penelitian ini secara umum adalah data kuantitatif, sehingga rancangan penelitian ini akan lebih banyak mempergunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif tanpa mengurangi kemungkinan untuk mengaplikasikan pendekatan-pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan daftar pertanyaan tertutup, yang dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang variabel Sumber Daya Manusia, Standar Operasional Prosedur, dan Struktur Organisasi, serta Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah observasi, wawancara, dan analisis isi (*content analysis*) dari dokumen tertulis serta dengan *triangulasi* yang ditujukan untuk mengecek/ memperbandingkan asumsi dari sumber data.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah pegawai yang berhubungan langsung dan menjadi salah satu bagian entitas pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang berjumlah 45 orang responden.

Kuesioner yang sudah dibagikan kepada semua responden, lalu dikembalikan jawabannya kepada peneliti, akan disusun secara rapi dan teliti. Selanjutnya, hasil pernyataan responden yang telah dikembalikan akan diuji secara kuantitatif melalui uji validitas dan reliabilitas.

Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk memastikan bahwa kuisisioner yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur variabel penelitian dengan baik. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas ini dilakukan secara statistik, yang dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 21, dengan langkah-langkah pengukurannya sebagai berikut:

1. Melakukan uji coba kuisisioner yang telah dikembalikan oleh 45 responden (semua pegawai pada entitas pengadaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Dengan jumlah responden sedikitnya 45 responden.
2. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban, yang dalam penelitian ini terdapat 10 pernyataan untuk variabel X1, 11 pernyataan untuk variabel X2, dan 10 pernyataan untuk

variabel X3, serta 11 pernyataan untuk variabel Y.

3. Kemudian dari hasil tabulasi jawaban tersebut dihitung korelasi antardata pada masing-masing pernyataan dengan skor total menggunakan rumus korelasi product moment, yang rumusnya sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana:

r = indeks korelasi product moment

n = jumlah responden

X = skor item angket

Y = skor total angket

$\sum XY$ = jumlah dari instrumen x yang dikali dengan jumlah instrumen y

$\sum X^2$ = jumlah kuadrat kriteria X

$\sum Y^2$ = jumlah kuadrat kriteria Y

Hasil perhitungan r dikonsultasikan dengan harga r kritik product moment dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga r hitung lebih besar dari r tabel maka dikatakan item soal itu valid. Atau dengan melihat hasil masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan.

Nilai korelasi yang telah didapatkan nantinya akan diuji untuk menyatakan apakah nilainya signifikan atau tidak. Caranya dengan uji korelasi. Bila ternyata semua nilai korelasi yang ada adalah signifikan, maka pertanyaan-pertanyaan yang ada memiliki validitas konstruksi, yang berarti terdapat konsistensi internal dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bila ternyata ada pertanyaan yang tidak signifikan, maka harus diganti atau dibuang, lalu diuji kembali hingga valid.

Uji validitas dengan korelasi Pearson, menggunakan SPSS, harus memenuhi kriteria valid apabila korelasinya bernilai positif dan nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)] < taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria di atas maka instrumennya dianggap tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali,

paling tidak oleh responden yang sama. Dengan kata lain, kuesioner harus konsisten (Umar, 2010: 63). Karena skor dalam kuesioner penelitian ini menggunakan angka 1 sampai dengan 5, maka untuk mencari reliabilitas instrumen dipergunakan rumus Alpha Cronbach (Cronbach's Alpha). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \delta b^2}{\delta t^2} \right)$$

dimana:

r₁₁ = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

δt^2 = varian total

$\sum \delta b^2$ = jumlah varians butir

Jumlah varian butir ditetapkan dengan cara mencari nilai varian tiap butir, kemudian dijumlahkan, dengan rumus varian yang digunakan:

$$\delta^2 = \frac{(\sum X)^2}{n-1}$$

$$\delta^2 = \frac{(\sum X)^2}{n-1}$$

di mana:

δ = varian tiap butir

n = jumlah responden

X = nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pertanyaan)

Hasil reliabilitas dikonsultasikan dengan harga r *product moment* pada taraf signifikan 5%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan reliabel.

Analisis Regresi

Jika jumlah variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen, maka hubungan antara kedua variabel disebut analisis regresi berganda (multiple regression). Bentuk rumusnya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

di mana:

Y = Variabel dependen

a = Konstanta b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

e = variabel random yang berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 0

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen

X1,X2,X3, maka hipotesis yang digunakan adalah:

1. $H_0: b_1 = b_2 = b_3 \dots b_k = 0$

merupakan model linier berganda yang tidak signifikan atau dengan kata lain, tidak ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

2. $H_0: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \dots b_k \neq 0$

merupakan model regresi linear berganda signifikan atau dengan kata lain ada hubungan atau pengaruh linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis-hipotesis penelitian. Kegunaan analisis ialah mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Sedangkan data hasil-hasil penelitian ditarik kesimpulan, biasanya berupa hasil-hasil numerik seperti skor tes dan statistik seperti nilai modus, presentase dan koefisien korelasi.

Analisis data penelitian tidak secara otomatis menyediakan jawab atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Diperlukan interpretasi atau penafsiran atas data tersebut. Interpretasi atau menafsir adalah menjelaskan dan menemukan arti, ini berarti menggarap hasil-hasil analisis, membuat inferensi yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji serta membuat kesimpulan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan probabilitas sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan secara sample random sampling yaitu cara pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Alat pengumpul data pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil angket. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang perlu direspon oleh responden.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei deskriptif, yaitu mengumpulkan data keadaan di lapangan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sesuai variabel yang diteliti. Metode penelitian ini bertujuan menguji hipotesis dengan cara mendasarkan pada pengamatan terhadap

akibat yang terjadi dari faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Konsekuensinya dari analisis ini memerlukan operasionalisasi variabel-variabel yang diukur secara kuantitatif.

Pengujian hipotesis digunakan dengan metode statistik. Untuk memperoleh informasi dari responden digunakan metode angket atau kuesioner sebagai alat pengumpul data. Kuesioner ini disusun sesuai indikator dari variabel yang diteliti, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang disediakan.

Angket menggunakan skala Likert (skala lima), yaitu dari jawaban yang paling positif sampai yang paling negatif. Setelah dilakukan skoring dan tabulasi data, data penelitian diolah secara deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisa statistik. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian didasarkan melalui perhitungan-perhitungan statistik dalam menganalisa seluruh data yang diperoleh.

Untuk menunjang kualitas penelitian juga dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam pada sejumlah key informan yang dianggap mengetahui dan memahami topik penelitian ini. Sehingga, dengan demikian diharapkan penelitian ini menghasilkan output yang terbaik.

Responden dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yakni melibatkan seluruh para pejabat dan pegawai yang termasuk dalam entitas pengadaan barang/jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebanyak 45 orang.

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa sebagian responden perempuan yaitu sebanyak 6 orang (13,3%), sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 39 orang (86,7%). Dengan demikian pejabat dan pegawai yang berada dalam entitas pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan didominasi oleh laki-laki.

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS jika disederhanakan menunjukkan bahwa responden untuk umur 21-30 tahun sebanyak 19 orang (42,2%), umur 31-40 tahun sebanyak 15 orang (33,3%) dan umur 41-50 tahun 11 (24,5%). Dengan demikian pejabat dan pegawai

yang berada dalam entitas pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan didominasi oleh umur 21-30 tahun.

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS menjelaskan bahwa responden pendidikan Diploma sebanyak 11 orang (24,4%), Sarjana sebanyak 26 orang (57,8%), dan Pascasarjana sebanyak 8 orang (17,8%). Dengan demikian pejabat dan pegawai yang berada dalam entitas pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berdasarkan pendidikan didominasi yang berpendidikan Sarjana.

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS tersebut menjelaskan bahwa responden untuk PPK (pejabat Pembuat Komitmen) sebanyak 13 orang (28,9%), KTU (Kasubbag Tata Usaha) sebanyak 3 orang (6,7%), POKJA (Kelompok Kerja) sebanyak 8 orang (17,8%), PPBJ (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa) sebanyak 8 orang (17,8%), PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) sebanyak 6 orang (13,3%) dan Staf PPK sebanyak 7 orang (15,6%). Dengan demikian pejabat dan pegawai yang berada dalam entitas pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berdasarkan jabatan didominasi oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS tersebut menjelaskan bahwa responden pada Bagian Kepegawaian sebanyak 3 orang (6,7%), Bagian Keuangan sebanyak 2 orang (4,4%), Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal sebanyak 3 orang (6,7%), Bagian Perlengkapan sebanyak 9 orang (20,0%), Bagian Umum sebanyak 3 orang (6,7%), Direktorat Barang Milik Negara sebanyak 5 orang (11,1%), Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat sebanyak 2 orang (4,4%), Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan sebanyak 3 orang (6,7%), Direktorat Lelang sebanyak 3 orang (6,7%), Direktorat Penilaian sebanyak 1 orang (2,2%), Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sebanyak 9 orang (20,0%) serta Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lainnya sebanyak 2 orang (4,4%). Dengan demikian pejabat dan pegawai yang berada dalam entitas pengadaan barang/jasa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berdasarkan unit kerja

didominasi pada Bagian Perlengkapan dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Setelah diketahui data responden tersebut kemudian peneliti menyebarkan kuesioner pada tanggal 3 Juni 2015. Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data dimaksud. Deskripsi berikut ini akan menyajikan hasil kuesioner dari responden dengan menggunakan tabel distribusi pada tiap-tiap indikator untuk mengetahui prosentase tanggapan responden atas Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui valid tidaknya setiap butir pernyataan kepada responden. Sebagai instrumen penelitian, butir kuesioner yang valid berarti butir kuesioner tersebut dapat dijadikan alat ukur untuk menilai apa yang hendak diukur dalam penelitian ini.

Keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal penting dalam penelitian ini. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total butir yang merupakan jumlah skor butir. Hasil pengujian dengan menggunakan korelasi product moment Pearson untuk tiap butir kuesioner menghasilkan r_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} dengan taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 45 responden dengan bantuan SPSS versi 21.00, maka hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan uji validitas di bawah ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner memiliki koefisien korelasi (r_{hitung}) lebih besar dari $r_{tabel} = 0,294$. Hal ini berarti bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner adalah valid, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Y	r _{hitung}			r _{tabel}	Ket.
	X1	X2	X3		
.671**	.656**	.847**	.706**	0.294	Valid
.749**	.521**	.876**	.810**	0.294	Valid
.814**	.572**	.805**	.787**	0.294	Valid
.696**	.670**	.772**	.748**	0.294	Valid
.664**	.620**	.794**	.798**	0.294	Valid
.632**	.596**	.739**	.564**	0.294	Valid
.626**	.653**	.765**	.666**	0.294	Valid
.727**	.701**	.739**	.695**	0.294	Valid
.819**	.618**	.754**	.626**	0.294	Valid
.742**	.529**	.670**	.712**	0.294	Valid
.714**		.698**		0.294	Valid

Sedangkan untuk uji reliabilitas dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas	Nilai	Ket.
	r _{hitung}		
Sumber Daya Manusia (X1)	.880	0.294	Valid
Standar Operasional Prosedur (X2)	.811	0.294	Valid
Struktur Organisasi (X3)	.820	0.294	Valid
Kinerja Implementasi Kebijakan (Y)	.778	0.294	Valid

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia (X1), Standar Operasional Prosedur (X2), Struktur Birokrasi (X3), dan Kinerja Implementasi Kebijakan (Y) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} = 0,294. Dapat diartikan alat ukur dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Hasil Uji Normalitas

Pengujian menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov, apabila hasilnya menunjukkan harga sig minimum lebih besar dari harga α maka dinyatakan data yang digunakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas galat taksiran dengan menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual 45
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2.20714163
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.072
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		.480
Asymp. Sig. (2-tailed)		.975

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sesuai hasil di atas dengan melakukan Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test diperoleh dengan nilai 0,480 dan Asymp. Sig. sebesar 0,975 yang berarti lebih besar dari 0,05, dapat diambil kesimpulan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Hasil Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas menggunakan rumus Levene, apabila hasilnya menunjukkan harga sig minimum lebih besar dari harga α maka dinyatakan harga yang digunakan berdistribusi homogen. Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas galat taksiran dengan menggunakan ANOVA memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Uji Homogenitas

Galat Taksiran	Harga Sig	Nilai α	Ket.
Y dengan X1	.001	0.05	Tidak Sama
Y dengan X2	.000	0.05	Tidak Sama
Y dengan X3	.001	0.05	Tidak Sama

Harga sig lebih besar dari 0,05, berarti galat taksiran berdistribusi tidak homogen. Sesuai dengan ketentuan di atas, maka untuk semua variabel yang menyatakan sebaran sampel mengikuti distribusi homogen dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: sebaran skor variabel Kinerja Implementasi Kebijakan (Y) atas variabel Sumber Daya Manusia (X1), Standar Operasional Prosedur (X2), Struktur Organisasi (X3) berdistribusi tidak sama.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi residual regresi (ut) tidak konstan atau

berubah-ubah secara sistematis seiring dengan berubahnya nilai variabel independen. Konsekuensi dari keberadaan heteroskedastisitas adalah analisis regresi akan menghasilkan estimator yang bias untuk nilai variasi ut dan dengan demikian variasi dari koefisien regresi. Akibatnya uji t, uji F dan estimasi nilai variabel dependen menjadi tidak valid. Uji yang dipergunakan adalah uji Glejser dimana dilakukan perhitungan dari korelasi antara variabel absolut ut dengan variabel-variabel bebas. Kemudian nilai dari semua rank spearman tersebut dibandingkan dengan nilai signifikansi yang ditentukan, yaitu $\alpha = 0,05$. Masalah heterokedastisitas tidak terjadi bila nilai rank spearman antara variabel absolut residual regresi dengan variabel-variabel bebas lebih besar dari nilai signifikansi (α). Berikut hasil perhitungan heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS versi 21.00 :

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		
	B	Std. Error				
(Constant)	2.785	1.916		1.454	.154	
1	X1	-.062	.045	-.250	-1.388	.173
	X2	.030	.053	.123	.565	.575
	X3	-.001	.057	-.003	-.017	.987

a. Dependent Variabel: RES_2

Tabel di atas menunjukkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan Glejser menghasilkan Harga Sig untuk X1 sebesar 0.173, X2 sebesar 0.575, dan X3 sebesar 0.987. Harga Sig tersebut lebih besar dari 0.05 yang berarti masalah heterokedastisitas tidak terjadi.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini. Autokorelasi akan menyebabkan estimasi nilai ut yang terlalu rendah, dan karenanya menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi untuk nilai koefisien korelasi. Bahkan ketika estimasi nilai variasi ut tidak terlalu rendah, maka estimasi nilai variasi dari koefisien regresi mungkin akan terlalu rendah, dan karenanya uji t dan uji F menjadi tidak valid lagi atau menghasilkan konklusi

yang menyesatkan, untuk melakukan uji autokorelasi untuk memberikan hasil yang menyatakan bahwa data yang diuji tidak dapat dipastikan apakah lolos dari masalah autokorelasi atau tidak, menggunakan uji run test, uji ini dipergunakan untuk melihat apakah data residual bersifat acak atau tidak. Bila tidak acak, berarti terjadi masalah autokorelasi. Residual regresi diolah dengan uji run test, kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) yang dipergunakan. Apabila nilai hasil uji run test lebih besar daripada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji. Berikut hasil perhitungan uji autokorelasi (uji run test) dengan menggunakan SPSS versi 21.00:

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.08378
Cases < Test Value	21
Cases >= Test Value	24
Total Cases	45
Number of Runs	26
Z	.636
Asymp. Sig. (2-tailed)	.525
a. Median	

Tabel di atas menunjukkan hasil run test sebesar 0,525 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

Pengujian Hipotesis

Setelah pengujian persyaratan analisis dan hasilnya sesuai dengan persyaratan, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang didukung oleh data empirik. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui korelasi antara variabel Sumber Daya Manusia (X1), Standar Operasional Prosedur (X2), dan Struktur Organisasi (X3), dengan variabel Kinerja Implementasi Kebijakan (Y).

Tujuan menghitung nilai koefisien determinasi untuk menjelaskan model kemampuan variasi variabel bebas (independen)

pengaruhnya terhadap variabel terikat (dependen). Uji-F dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) secara simultan terhadap variabel terikat (dependen). Sedangkan Uji-t untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen).

Penghitungan pengujian hipotesis antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen), dilakukan dengan bantuan SPSS versi 21.00. Berikut ini hasil dari analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), Uji-F, dan Uji-t:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t _{hitung}	Probabilitas
constant	8,901	2,628	0,012
Sumber Daya Manusia (X1) Standar Operasional Prosedur (X2) Struktur Organisasi (X3)	0,210	2,668	0,011
	0,235	2,512	0,016
	0,410	4,011	0,000

$R^2=0,722$
 $F_{hitung}=35,449$

Berdasarkan Tabel di atas, persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,901 + 0,210X_1 + 0,235X_2 + 0,410X_3$$

Nilai konstanta sebesar 8,901; berarti variabel kinerja implementasi kebijakan (Y) adalah sebesar 8,901 persen, dengan asumsi bahwa variabel sumber daya manusia (X1), standar operasional prosedur (X2), dan struktur organisasi (X3) adalah konstan.

Nilai koefisien variabel sumber daya manusia (X1) sebesar 0,210; berarti variabel sumber daya manusia (X1) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel kinerja implementasi kebijakan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel sumber daya manusia (X1) akan menaikkan variabel kinerja implementasi kebijakan (Y). Jika terjadi kenaikan variabel sumber daya manusia (X1) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel kinerja implementasi kebijakan (Y) sebesar 0,210 persen, dengan asumsi bahwa variabel standar operasional prosedur (X2) dan struktur organisasi (X3) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefisien variabel standar operasional prosedur (X2) sebesar 0,235; berarti variabel standar operasional prosedur (X2) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel kinerja implementasi kebijakan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel standar operasional prosedur (X2) akan menaikkan variabel kinerja implementasi kebijakan (Y). Jika terjadi kenaikan variabel standar operasional prosedur (X2) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel kinerja implementasi kebijakan (Y) sebesar 0,235 persen, dengan asumsi bahwa variabel sumber daya manusia (X1) dan struktur organisasi (X3) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

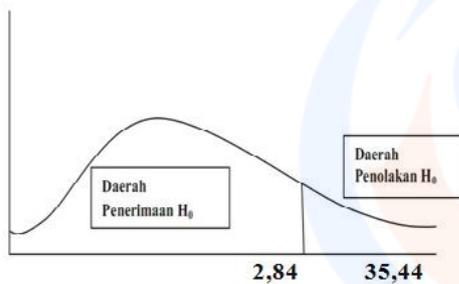
Nilai koefisien variabel struktur organisasi (X3) sebesar 0,410; berarti variabel struktur organisasi (X3) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel kinerja implementasi kebijakan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel struktur organisasi (X3) akan menaikkan variabel kinerja implementasi kebijakan (Y). Jika terjadi kenaikan variabel struktur organisasi (X3) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel kinerja implementasi kebijakan (Y) sebesar 0,410 persen, dengan asumsi bahwa variabel sumber daya manusia (X1) dan standar operasional prosedur (X2) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,722 atau 72,2 persen. Dapat diartikan naik turunnya variabel kinerja implementasi kebijakan (Y) sebesar 72,2 persen dipengaruhi oleh variabel sumber daya manusia (X1), standar operasional prosedur (X2), dan struktur organisasi (X3). Sedangkan sisanya sebesar 27,8 persen dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Hasil Uji F

Untuk menguji pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) digunakan uji F. berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen atau $\alpha = 0,05$; diperoleh nilai F tabel sebesar = 2,84 sedangkan nilai F_{hitung} sebesar = 35,44 Melalui kurva dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



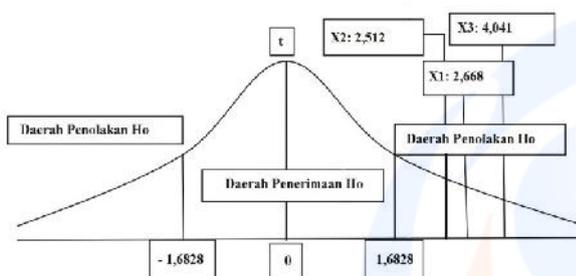
Gambar 1
Kurva Uji F

Dari gambar kurva uji F tersebut, dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} yaitu $35,44 > 2,84$; atau berada pada daerah penolakan H_0 .

Dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia (X1), standar operasional prosedur (X2), dan struktur organisasi (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y). Berarti hipotesis yang menyatakan bahwa variabel sumber daya manusia (X1), standar operasional prosedur (X2), dan struktur organisasi (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y), dapat diterima.

Hasil Uji t

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel sumber daya manusia (X1), standar operasional prosedur (X2), dan struktur organisasi (X3) terhadap variabel implementasi kebijakan (Y) digunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$; maka diketahui nilai t tabel sebesar 1,6828. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai t hitung seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2
Kurva Uji t

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (X1)

Berdasarkan gambar 2 diketahui nilai t_{hitung} variabel sumber daya manusia (X1) sebesar 2,668. Dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ nilai t_{tabel} sebesar 1,6828. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y), sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel sumber daya manusia (X1) terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y), dapat diterima.

2. Standar Operasional Prosedur (X2)

Berdasarkan gambar 2 diketahui nilai t_{hitung} variabel standar operasional prosedur (X2) sebesar 2,512. Dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ nilai t_{tabel} sebesar 1,6828. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa variabel standar operasional prosedur (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y), sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel standar operasional prosedur (X2) terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y), dapat diterima.

3. Struktur Organisasi (X3)

Berdasarkan gambar 2 diketahui nilai t_{hitung} variabel struktur organisasi (X3) sebesar 4,041. Dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ nilai t_{tabel} sebesar 1,6828. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur organisasi (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y), sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel struktur organisasi (X3) terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y), dapat diterima.

Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perhitungan persamaan regresi linier berganda adalah

$$Y = 8,901 + 0,210X_1 + 0,235X_2 + 0,410X_3$$

Dengan demikian dari ketiga variabel tersebut, variabel struktur organisasi dalam korelasinya memberikan pengaruh pada tingkat signifikan taraf yang kuat terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan. Sebab, jika variabel struktur organisasi mengalami kenaikan sebesar satu persen, korelasi terhadap kenaikan kinerja implementasi kebijakan sebesar 0,410 persen.

Hasil uji koefisien determinasi diketahui bahwa 72,2 persen kinerja implementasi kebijakan ditentukan oleh masing-masing variabel sumber daya manusia, standar operasional prosedur, dan struktur organisasi sedangkan sisanya sebesar 27,8 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam model penelitian ini.

Hasil perhitungan dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen atau $\alpha = 0,05$; diperoleh nilai F_{tabel} sebesar = 2,84 sedangkan nilai F_{hitung} sebesar = 35,44. Dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ yaitu $35,44 > 2,84$; atau berada pada daerah penolakan H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia (X1), standar operasional prosedur (X2), dan struktur organisasi (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y).

Hasil analisis Uji t dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$; maka diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,6828. Diketahui nilai t_{hitung} variabel sumber daya manusia (X1) sebesar 2,668; nilai t_{hitung} variabel standar operasional prosedur (X2) sebesar 2,512; nilai t_{hitung} variabel struktur organisasi (X3) sebesar 4,041. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia (X1), standar operasional prosedur (X2), dan struktur organisasi (X3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan (Y), sehingga hipotesis dapat diterima.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Variabel sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

variabel kinerja implementasi kebijakan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel sumber daya manusia terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan dapat diterima.

Variabel standar operasional prosedur secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel standar operasional prosedur terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan dapat diterima.

Variabel struktur organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel struktur organisasi terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan dapat diterima.

Variabel struktur organisasi berpengaruh paling signifikan terhadap variabel kinerja implementasi kebijakan. Dalam variabel ini terdapat 3 (tiga) butir pertanyaan kuesoner yang memiliki hasil lemah, yaitu: (1). Implementasi Pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Kantor Pusat DJKN telah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2). Unit Layanan Pengadaan pada Kantor Pusat DJKN telah menerapkan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku; (3). Implementasi Pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Kantor Pusat DJKN telah mewujudkan pendelegasian wewenang yang baik dan terarah.

Pembuktian dengan uji F, bahwa variabel sumber daya manusia, standar operasional prosedur, dan struktur organisasi, berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan kinerja implementasi kebijakan pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Artinya, kinerja implementasi kebijakan tersebut berhasil.

Daftar Pustaka

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. (2015). *Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Jakarta.

- Dunn, William N., Muhadjir Darwin (penyunting). (2001). *Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis Dan Prosedur Perumusan Masalah*, Hanindita, Yogyakarta.
- Hadisaputra, Mandar Trisno, SE., MM. (2014). *Mudah Membaca Perpres 70 Tahun 2012*, Simetris Printing and Design, Serang.
- http://www.academia.edu/3075559/Teori_Organisasi
- http://www.academia.edu/6688520/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK
- http://www.academia.edu/7739152/Pengertian_Dan_Peranan_Sumber_Daya_Manusia_3_0_4137
- http://www.academia.edu/8634744/A_PENGETIHAN_STANDAR_OPERASIONAL_PROSEDUR
- Ismaly, M. Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1106/KM.1/2012 Tanggal 8 November 2012 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1559/KM.1/2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Volume 1 Number 1 Desember 2011, *Jurnal Pengadaan "Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, LKPP, Jakarta.
- Misroji. (2012). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City pada Diskominfo Kota Depok, Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Muhammad Arifin Siregar, S.Sos. (2008). Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 7 Mei 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- Program Pascasarjana Universitas Indonusa Esa Unggul. (2007). *Pedoman Penyusunan Tesis*, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.
- Ramli, Samsul. (2014). *Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media Pustaka, Jakarta.

Sumarto, Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1270/SJ/2012 Tanggal 25 Juni 2012 Hal : Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Suswinarno, Ak., MM. (2012). *Aman dari Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visi* Media Pustaka, Jakarta.

Sutisna, Nandang. (2010). *Konsolidasi Perpres 54/2010 Sampai Perubahan Keempat*. <http://www.nandangsutisna.com/>. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. (1991). *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Bandung.

Wibawa, Samudra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.

Winarno, Budi, (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, MedPres, Yogyakarta.